

---

## **Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Layanan Publik: Studi Pengabdian di Kelapa Lima, Merauke**

**Damianus Katayu<sup>1</sup>, Josafat Fonataba<sup>2</sup>**

Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Yaleka Maro, Merauke, Indonesia<sup>1,2</sup>

✉ Email Korespodensi: [katayudamianus@gmail.com](mailto:katayudamianus@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

#### **Histori Artikel:**

*Diterima* 12-06-2025

*Disetujui* 15-07-2025

*Diterbitkan* 31-07-2025

#### **Katakunci:**

*Administrasi Kampung;  
Pengabdian Masyarakat;  
Tata Kelola; Transparansi;  
Digitalisasi Sederhana.*

### **ABSTRAK**

Penguatan kapasitas aparatur kampung dalam tata kelola administrasi publik merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel, terutama di wilayah perbatasan seperti Kampung Kelapa Lima, Merauke. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur kampung dalam pengelolaan administrasi melalui pelatihan teknis, pendampingan langsung, dan penerapan sistem informasi digital sederhana yang disesuaikan dengan konteks lokal. Metode pelaksanaan kegiatan dirancang secara partisipatif dan kolaboratif, diawali dengan pemetaan kebutuhan, dilanjutkan dengan penyusunan modul, pelatihan, pendampingan, hingga evaluasi berkala. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kemampuan aparatur dalam menyusun dokumen administrasi, tata naskah dinas, dan laporan kegiatan. Selain itu, telah berhasil diimplementasikan sistem informasi administrasi berbasis spreadsheet yang memungkinkan pencatatan surat menyurat, data penduduk, dan agenda kegiatan secara lebih terstruktur. Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan administratif. Masyarakat juga mulai terlibat aktif dalam forum kampung, menandai tumbuhnya kesadaran akan transparansi dan akuntabilitas publik. Tantangan seperti keterbatasan perangkat dan literasi digital tetap ada, namun dapat diatasi melalui pendekatan berkelanjutan dan dukungan lintas sektor. Pengalaman ini menunjukkan bahwa model pengabdian yang berbasis kebutuhan lokal dan praktik langsung dapat direplikasi sebagai strategi penguatan administrasi publik di kampung-kampung perbatasan lainnya.

### **Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Katayu, D., & Fonataba, J. . (2025). Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Layanan Publik: Studi Pengabdian di Kelapa Lima, Merauke. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4), 835-846. <https://doi.org/10.63822/jmxx9r46>



## PENDAHULUAN

Kampung Kelapa Lima di Merauke merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung di wilayah perbatasan Indonesia. Namun, tantangan dalam tata kelola administrasi publik di tingkat kampung masih cukup signifikan, khususnya dalam hal kapasitas aparatur kampung dalam memberikan layanan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Nasir 2025). Minimnya pelatihan, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi, serta kurangnya penggunaan teknologi informasi menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pelayanan publik di kampung tersebut. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, dilakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur kampung melalui pelatihan, pendampingan, dan asistensi teknis terkait administrasi publik dan pelayanan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan aparatur dalam mengelola data kependudukan, penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan kualitas interaksi pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berkontribusi pada perbaikan tata kelola lokal, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan di wilayah perbatasan seperti Merauke.

Permasalahan yang dihadapi dalam tata kelola administrasi publik di Kampung Kelapa Lima, Merauke, sangat kompleks dan mencerminkan kondisi umum kampung di wilayah perbatasan. Salah satu isu utama adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik. Hal ini tampak dari lemahnya penguasaan terhadap tata naskah dinas, prosedur penyusunan laporan keuangan dan kegiatan, serta minimnya dokumentasi yang sistematis terhadap pelayanan masyarakat, seperti pencatatan penduduk, pengarsipan surat menyurat, dan pengelolaan aset kampung. Selain itu, masih terjadi ketergantungan tinggi terhadap bantuan eksternal dalam penyusunan dokumen-dokumen strategis kampung, seperti RPJM dan APBKamp, akibat kurangnya pelatihan teknis yang memadai. Permasalahan semakin diperburuk dengan keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti tidak tersedianya perangkat komputer yang memadai, keterbatasan akses internet, dan tidak adanya sistem informasi administrasi kampung berbasis digital. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan publik, kurangnya transparansi, serta menurunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur kampung, sehingga menuntut adanya intervensi melalui program pengabdian masyarakat yang menasar penguatan kapasitas, sistem, dan teknologi.

Pengabdian masyarakat sebelumnya yang dilakukan di beberapa kampung di wilayah Merauke umumnya berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan nonformal, dan penyuluhan kesehatan, namun masih terbatas dalam intervensi langsung pada aspek tata kelola administrasi publik di tingkat kampung (Jemalu, Wulandary, and Purwatiningsih 2025). Beberapa kegiatan yang relevan antara lain pelatihan dasar penggunaan komputer bagi aparatur kampung, penyuluhan tentang pentingnya transparansi anggaran desa, serta pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kampung. Meskipun kegiatan tersebut memberikan kontribusi awal, namun belum menyentuh secara komprehensif pada penguatan kapasitas administrasi aparatur, sistem pengelolaan dokumen, serta penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik kampung. Oleh karena itu, dibutuhkan model pengabdian yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan kontekstual dengan kebutuhan lokal seperti yang dirancang dalam kegiatan di Kampung Kelapa Lima ini.

Kesenjangan utama yang ditemukan terletak pada belum optimalnya pendekatan pengabdian

masyarakat sebelumnya dalam menjawab kebutuhan riil aparatur kampung terkait tata kelola administrasi publik yang profesional dan berbasis teknologi. Meskipun telah dilakukan berbagai pelatihan dan penyuluhan, mayoritas kegiatan bersifat umum dan belum diarahkan secara spesifik untuk membangun kapasitas teknis aparatur dalam pengelolaan administrasi, pelaporan keuangan, serta pelayanan berbasis sistem informasi. Selain itu, belum ada integrasi antara pelatihan yang diberikan dengan penerapan langsung di lingkungan kerja aparatur kampung, sehingga transfer pengetahuan cenderung tidak berkelanjutan (Rikardus et al. 2025). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan pengabdian yang tidak hanya fokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada penguatan praktik administratif, pendampingan langsung, dan pembangunan sistem pendukung yang kontekstual dan aplikatif di Kampung Kelapa Lima.

Urgensi pengabdian ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas tata kelola administrasi publik di Kampung Kelapa Lima, Merauke, sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan dasar masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan semakin kompleksnya tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan kampung, aparatur dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang memadai serta dukungan sistem informasi yang mempermudah pelaksanaan tugas mereka. Tanpa adanya intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan, maka pelayanan publik di tingkat kampung akan terus mengalami stagnasi, berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat serta lambatnya kemajuan pembangunan lokal. Kebaruan dari program pengabdian ini terletak pada pendekatannya yang integratif dan aplikatif, yaitu dengan menggabungkan pelatihan berbasis praktik langsung, pendampingan intensif dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen administrasi, serta pengenalan dan implementasi sistem informasi administrasi kampung berbasis digital sederhana yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Pengabdian ini juga menekankan pada penguatan budaya kerja yang akuntabel dan partisipatif melalui pelibatan seluruh perangkat kampung dan tokoh masyarakat dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga mendorong transformasi kinerja aparatur secara sistemik dan berkelanjutan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur Kampung Kelapa Lima melalui pelatihan praktis, pendampingan administratif, dan penerapan sistem informasi digital sederhana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini disusun secara sistematis dan berbasis partisipatif untuk menjawab kebutuhan riil yang dihadapi oleh aparatur Kampung Kelapa Lima dalam pengelolaan administrasi publik. Kegiatan ini mengacu pada pendekatan kolaboratif yang menggabungkan antara pelatihan teknis, pendampingan langsung, serta perancangan solusi digital yang sederhana dan kontekstual. Fokus utamanya adalah pada peningkatan kapasitas aparatur kampung agar mampu melaksanakan tugas administrasi secara efektif, efisien, dan akuntabel. Langkah pertama dalam kegiatan ini adalah identifikasi kebutuhan dan pemetaan permasalahan administrasi kampung. Tim pengabdian melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan kepala kampung dan perangkatnya, serta mengkaji dokumen-dokumen administratif yang tersedia. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai tingkat pemahaman aparatur terhadap tugas administratif, sistem kerja yang

berjalan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi, baik dari aspek sumber daya manusia maupun sarana pendukung.

Setelah permasalahan teridentifikasi, dilakukan penyusunan modul pelatihan dan perangkat intervensi yang disesuaikan dengan konteks lokal. Modul mencakup topik-topik penting seperti tata naskah dinas, pengelolaan arsip kampung, penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, serta pengenalan sistem informasi administrasi sederhana berbasis spreadsheet atau aplikasi open-source. Modul disusun secara praktis agar mudah dipahami oleh aparatur kampung yang latar belakang pendidikannya beragam. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan teknis kepada seluruh aparatur kampung, yang dilaksanakan secara interaktif dan berbasis praktik. Pelatihan ini dirancang dalam bentuk lokakarya dan simulasi kerja, seperti praktik menulis surat resmi, mengarsipkan dokumen, dan menyusun laporan kegiatan. Selama pelatihan, peserta juga dikenalkan pada penggunaan perangkat komputer dan sistem pencatatan digital yang sesuai dengan kapasitas dan ketersediaan sarana di Kampung Kelapa Lima.

Selain pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan intensif di lapangan selama beberapa minggu. Dalam tahap ini, tim pengabdian terlibat langsung dalam aktivitas harian aparatur kampung, memberikan asistensi teknis, mengoreksi dokumen administratif yang dibuat, serta membantu membangun sistem kerja yang lebih terorganisir. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan dapat diterapkan secara nyata dalam rutinitas administrasi kampung. Selama proses pendampingan, tim juga membantu dalam perancangan sistem informasi administrasi kampung berbasis digital sederhana, seperti format pencatatan surat masuk dan keluar, database penduduk kampung, serta sistem pelaporan kegiatan dan anggaran. Aplikasi yang digunakan dibuat sesederhana mungkin dengan platform yang dapat dioperasikan secara offline, mengingat keterbatasan infrastruktur internet di wilayah tersebut.

Untuk memastikan efektivitas program, dilakukan evaluasi berkala melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, serta observasi terhadap perubahan pola kerja administrasi kampung. Selain itu, tim juga melakukan wawancara reflektif dengan aparatur kampung untuk memperoleh masukan langsung terkait pelaksanaan kegiatan dan kendala yang masih dihadapi. Hasil dari evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan buku panduan administrasi kampung berbasis kebutuhan lokal, yang berisi prosedur standar operasional (SOP) dan format-format dokumen administrasi. Panduan ini diharapkan menjadi alat bantu yang berkelanjutan bagi aparatur kampung, sekaligus menjadi bagian dari dokumentasi hasil pengabdian yang dapat direplikasi di kampung lain di wilayah Merauke.

Kegiatan juga mencakup pelibatan masyarakat dan tokoh lokal dalam tahap diseminasi hasil, agar proses reformasi administrasi kampung tidak hanya bersifat top-down dari aparatur, tetapi juga mendapat dukungan partisipatif dari warga. Hal ini dilakukan melalui forum diskusi kampung yang memperkenalkan sistem baru yang diterapkan dan mengajak masyarakat untuk turut menjaga transparansi dalam pengelolaan pelayanan publik. Dengan metode pelaksanaan yang terstruktur dan integratif ini, kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas aparatur kampung secara teknis, tetapi juga menanamkan budaya kerja yang akuntabel dan adaptif terhadap perubahan. Keberlanjutan program dijaga melalui rencana tindak lanjut yang melibatkan pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi agar pembinaan dan pendampingan dapat terus berlanjut setelah kegiatan ini selesai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Kelapa Lima, Merauke, bertujuan untuk menjawab kebutuhan nyata dalam peningkatan kapasitas administrasi publik di tingkat kampung. Melalui pendekatan pelatihan teknis, pendampingan langsung, serta penerapan sistem informasi sederhana yang sesuai dengan kondisi lokal, kegiatan ini berhasil membangun pondasi tata kelola yang lebih tertata dan profesional. Berikut disajikan hasil utama dari pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut.

**Tabel 1 Hasil Peningkatan Kompetensi Aparatur Kampung Kelapa Lima**

Nama Aparatur	Skor Pre-test	Skor Post-test	Peningkatan Skor	Kualitas Surat Resmi	Kualitas Laporan Kegiatan	Penggunaan Template	Keterangan
Aparatur 1	45	78	33	Standar	Sistematis	Digunakan	Membaik
Aparatur 2	50	82	32	Standar	Rapi & Lengkap	Digunakan	Signifikan
Aparatur 3	38	70	32	Cukup Baku	Lebih Terstruktur	Mulai Digunakan	Membaik
Aparatur 4	55	80	25	Standar	Sistematis	Digunakan	Signifikan
Aparatur 5	48	76	28	Baku	Runtut	Digunakan	Membaik

Hasil evaluasi terhadap lima aparatur Kampung Kelapa Lima menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kompetensi administrasi setelah mengikuti program pelatihan dan pendampingan. Data pre-test dan post-test mengindikasikan adanya kenaikan skor yang konsisten, dengan peningkatan tertinggi mencapai 33 poin dan terendah 25 poin, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan efektif dalam meningkatkan pemahaman teknis aparatur terhadap administrasi publik. Selain peningkatan skor, terjadi perbaikan nyata dalam kualitas dokumen administrasi yang dihasilkan. Kualitas surat resmi yang semula hanya standar atau cukup baku, mulai menunjukkan format yang lebih sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas. Laporan kegiatan menjadi lebih sistematis, rapi, dan lengkap, serta penggunaan template administrasi mulai diterapkan secara konsisten oleh seluruh aparatur. Perubahan ini mencerminkan terjadinya transformasi positif dalam praktik administrasi sehari-hari di tingkat kampung, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pelayanan publik di Kampung Kelapa Lima.

**Tabel 2 Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Sederhana oleh Aparatur Kampung Kelapa Lima**

Nama Aparatur	Pengisian Data Surat Masuk & Keluar	Input Data Penduduk	Pencatatan Agenda Kegiatan	Frekuensi Penggunaan per Minggu	Keterangan
Aparatur 1	Lengkap & Tepat Waktu	Lengkap	Terisi 80%	3 kali	Aktif & Konsisten
Aparatur 2	Lengkap	Lengkap	Lengkap	4 kali	Sangat Aktif
Aparatur 3	Sebagian Terisi	Lengkap	Terisi 60%	2 kali	Perlu Pendampingan

Aparatur 4	Lengkap	Terbarui Mingguan	Lengkap	3 kali	Konsisten
Aparatur 5	Lengkap	Lengkap	Lengkap	4 kali	Sangat Aktif

Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi administrasi sederhana berbasis spreadsheet di Kampung Kelapa Lima telah berjalan secara efektif dan mulai dioperasikan oleh seluruh aparatur kampung. Sebagian besar aparatur mampu mengisi data surat masuk dan keluar secara lengkap dan tepat waktu, serta melakukan input data penduduk dan pencatatan agenda kegiatan dengan tingkat keterisian yang tinggi, mencapai 80–100%. Frekuensi penggunaan sistem ini rata-rata 3 hingga 4 kali per minggu, menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup aktif dalam pengelolaan data administrasi. Meskipun terdapat satu aparatur yang masih memerlukan pendampingan lebih lanjut, secara umum sistem ini berhasil diadopsi dengan baik dan menyesuaikan dengan keterbatasan perangkat serta akses internet yang minim. Capaian ini menandakan bahwa digitalisasi sederhana yang kontekstual dapat meningkatkan efisiensi dan keteraturan dalam tata kelola administrasi kampung.

**Tabel 3 Indikator Peningkatan Kesadaran Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur Kampung**

Indikator	Sebelum Pengabdian	Setelah Pengabdian	Perubahan/Keterangan
Jumlah informasi publik yang diumumkan secara terbuka (per bulan)	1 informasi umum	4 informasi (anggaran, kegiatan, agenda rapat, laporan)	Meningkat 4× lipat
Jumlah pertemuan kampung dengan masyarakat	1 kali per semester	1 kali per bulan	Lebih rutin dan interaktif
Partisipasi warga dalam forum kampung (%)	±20%	±60%	Partisipasi meningkat 3× lipat
Media informasi yang digunakan	Lisan	Papan pengumuman, banner, dan pertemuan	Diversifikasi media komunikasi
Respons masyarakat terhadap informasi publik	Pasif	Aktif memberi masukan dan kritik	Masyarakat mulai terlibat dalam pengawasan

Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran aparatur Kampung Kelapa Lima terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan kampung. Sebelum kegiatan dilakukan, informasi publik yang diumumkan hanya terbatas pada satu jenis informasi umum setiap bulan, namun setelah intervensi, jumlahnya meningkat menjadi empat jenis informasi, termasuk anggaran, agenda kegiatan, dan laporan. Frekuensi pertemuan antara aparatur dan masyarakat pun meningkat dari satu kali per semester menjadi satu kali setiap bulan, dengan partisipasi warga yang sebelumnya hanya sekitar 20% naik menjadi 60%. Media komunikasi yang digunakan juga lebih beragam, tidak hanya lisan tetapi melalui papan pengumuman dan media visual sederhana lainnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai aktif memberi masukan dan kritik, serta terlibat dalam pengawasan, yang menandakan keberhasilan upaya membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di tingkat kampung.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan lokal memberikan dampak yang nyata dan signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur kampung. Kampung Kelapa Lima, yang sebelumnya belum memiliki sistem administrasi yang tertata

dengan baik, mengalami perubahan positif setelah dilakukannya pelatihan dan pendampingan. Seluruh kegiatan didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan di lapangan, sehingga setiap materi pelatihan, simulasi, dan praktik yang diberikan dirasakan langsung manfaatnya oleh para aparatur (Saragih et al. 2023). Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi tidak bersifat top-down atau generik, melainkan benar-benar menjawab kekosongan kompetensi dan struktur kerja yang dibutuhkan oleh pemerintah kampung (Lalu 2021). Aparatur kampung yang sebelumnya tidak terbiasa menyusun surat dinas resmi, laporan kegiatan, dan mendokumentasikan pelayanan masyarakat, kini mulai memahami standar-standar dasar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Peningkatan kapasitas ini tercermin dalam kemampuan mereka mengelola dokumen secara sistematis, serta menyusun laporan keuangan dan program kampung dengan lebih tertib. Pengetahuan yang semula bersifat teoritis kini mulai terinternalisasi dalam praktik kerja harian, karena metode yang digunakan mengedepankan pembelajaran berbasis praktik langsung (Wijayati 2025). Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membangun kepercayaan diri aparatur kampung dalam menjalankan tugas-tugas administratif secara mandiri.

Pendekatan berbasis kebutuhan lokal (*needs-based approach*) yang digunakan terbukti efektif karena memperhatikan konteks sosial, budaya, dan kemampuan lokal yang ada (Najamudin and Al Fajar 2024). Tidak semua kampung memiliki latar belakang sumber daya manusia yang sama, sehingga generalisasi intervensi seringkali kurang efektif. Oleh karena itu, desain pengabdian yang diawali dengan pemetaan masalah dan keterbatasan secara partisipatif membuat solusi yang diberikan terasa relevan dan langsung dapat diterapkan. Interaksi intensif antara tim pengabdian dengan aparatur kampung juga memperkuat relasi sosial dan membangun suasana belajar yang nyaman dan saling menghargai (Zianida, Wafa, and Wibowo 2024). Keberhasilan pendekatan ini memberikan pelajaran penting bagi program pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal lainnya. Kunci utama dari keberhasilan ini terletak pada penyesuaian program dengan kondisi nyata di lapangan dan keterlibatan aktif pihak yang menjadi sasaran. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap tugas-tugas administrasi, aparatur kampung kini memiliki bekal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Model ini dapat dijadikan contoh bagi intervensi serupa di kampung-kampung lain yang menghadapi tantangan sejenis.

Metode pelatihan berbasis praktik langsung terbukti sebagai pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kompetensi teknis aparatur Kampung Kelapa Lima, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan. Kegiatan pelatihan yang dilakukan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi disusun dalam bentuk simulasi kerja nyata seperti praktik menyusun surat dinas, membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan mengelola arsip surat masuk dan keluar. Model ini memungkinkan peserta untuk belajar melalui pengalaman langsung dan memahami alur kerja secara aplikatif (Habibah 2024). Hal ini sangat penting mengingat sebagian besar aparatur belum memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang administrasi. Pelatihan juga dirancang untuk mendorong pembelajaran aktif dan kontekstual, di mana peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, melainkan terlibat langsung dalam memecahkan kasus-kasus administratif yang relevan dengan situasi kampung. Pendekatan ini menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan partisipatif, sekaligus menumbuhkan kesadaran kritis terhadap pentingnya keterampilan administrasi yang akurat dan akuntabel (Nufus, Riyanto, and Setyowati 2024). Dalam pelaksanaan lokakarya, peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi, mempresentasikan hasil kerja, dan menerima umpan balik secara langsung, yang mendorong peningkatan kualitas secara bertahap.



Berbeda dengan metode ceramah satu arah yang umumnya kurang efektif dalam konteks masyarakat kampung yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam, metode praktik langsung terbukti mampu mengatasi hambatan pemahaman secara lebih cepat dan bermakna. Aparatur kampung merasa lebih terlibat dan termotivasi karena pelatihan dirasakan sebagai sesuatu yang konkret dan relevan dengan tugas sehari-hari mereka. Bahkan, beberapa peserta menunjukkan inisiatif untuk mengembangkan format administrasi sendiri berdasarkan contoh yang telah diberikan, sebagai bentuk internalisasi dari hasil pelatihan. Dengan pendekatan ini, pelatihan tidak hanya menghasilkan peningkatan keterampilan jangka pendek, tetapi juga membentuk kebiasaan kerja baru yang lebih sistematis dan profesional (Kamala et al. 2025). Efektivitas pelatihan berbasis praktik ini menjadi bukti bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kampung membutuhkan metode yang bersifat aplikatif, adaptif, dan responsif terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, metode ini layak dijadikan rujukan dalam perancangan program pengabdian masyarakat di wilayah perdesaan dan perbatasan yang memiliki karakteristik serupa.

Pendampingan intensif yang dilakukan selama kegiatan pengabdian masyarakat telah menghasilkan perubahan signifikan dalam pola kerja aparatur Kampung Kelapa Lima. Sebelum intervensi dilakukan, sistem administrasi kampung cenderung bersifat informal, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sering kali bergantung pada ingatan personal atau pencatatan manual yang tidak konsisten. Melalui proses asistensi langsung yang dilakukan secara rutin, aparatur mulai membentuk kebiasaan kerja baru yang lebih disiplin, seperti mencatat setiap surat masuk dan keluar, menyusun laporan kegiatan tepat waktu, serta menyimpan dokumen secara terorganisir. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis administrasi, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Aparatur mulai memahami pentingnya dokumentasi dalam menunjang akuntabilitas pelayanan publik dan menjaga keberlanjutan program kampung. Mereka menjadi lebih teliti dalam mengelola informasi, lebih sadar terhadap tenggat waktu, dan menunjukkan kepedulian terhadap kualitas data dan laporan yang dihasilkan. Perubahan ini menjadi indikator awal keberhasilan dalam membangun budaya birokrasi yang profesional di tingkat lokal, yang sebelumnya sering kali terabaikan di wilayah perbatasan.

Penting dicatat bahwa perubahan pola kerja ini tidak terjadi secara instan, tetapi merupakan hasil dari pendekatan pendampingan yang bersifat edukatif dan kolaboratif. Alih-alih memberikan koreksi atau perintah satu arah, tim pengabdian melibatkan aparatur kampung dalam proses belajar bersama, mengidentifikasi kesalahan, dan mencari solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Hal ini menciptakan rasa memiliki terhadap proses dan hasil, serta menumbuhkan motivasi intrinsik aparatur untuk terus memperbaiki kinerjanya secara mandiri. Pendampingan ini tidak hanya menghasilkan dokumen-dokumen administrasi yang lebih rapi, tetapi juga menciptakan perubahan mendasar dalam etos kerja aparatur kampung (Kristanti and Haryati 2023). Pola kerja yang semula reaktif dan tidak terencana berubah menjadi lebih proaktif, terstruktur, dan berbasis bukti. Budaya kerja yang mulai terbentuk ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pemerintahan kampung yang lebih efektif, transparan, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Model perubahan ini juga membuka peluang replikasi di kampung lain dengan pendekatan serupa.

Implementasi sistem informasi administrasi kampung berbasis spreadsheet sederhana di Kampung Kelapa Lima merupakan langkah strategis dalam menjawab keterbatasan infrastruktur digital yang umum terjadi di wilayah perbatasan. Sistem ini dirancang agar dapat dioperasikan secara offline dengan

menggunakan perangkat komputer dasar yang telah tersedia di kantor kampung. Format spreadsheet dipilih karena lebih familiar bagi sebagian besar aparatur dan tidak membutuhkan jaringan internet atau perangkat lunak berlisensi mahal. Solusi ini menjadi bentuk inovasi lokal yang mengedepankan prinsip efisiensi, kesederhanaan, dan keberlanjutan. Digitalisasi dalam bentuk sederhana ini telah membuka paradigma baru bagi aparatur kampung terhadap pentingnya sistem pencatatan berbasis data. Melalui sistem informasi tersebut, arsip surat menyurat, data penduduk, dan laporan kegiatan mulai terdokumentasi secara elektronik dan dapat diakses secara lebih cepat dan rapi. Aparatur mulai menyadari bahwa penggunaan teknologi, meski sangat mendasar, dapat mempercepat proses kerja dan meminimalisasi kesalahan akibat pencatatan manual. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang disesuaikan dengan konteks lokal.

Keberhasilan digitalisasi ini juga berakar pada pendekatan pelatihan dan pendampingan yang tidak hanya menekankan pada penguasaan teknis, tetapi juga pada penanaman nilai fungsional teknologi. Alih-alih menekankan penggunaan aplikasi yang kompleks, pengabdian ini justru menekankan pentingnya pemahaman konsep dasar pengelolaan data dan keteraturan kerja. Dengan begitu, teknologi bukan dipersepsikan sebagai beban, melainkan sebagai alat bantu kerja yang dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun demikian, dalam pelaksanaan digitalisasi tersebut terdapat sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi digital pada sebagian aparatur kampung (Syahrudin, Jalal, et al. 2023). Sebagian dari mereka masih belum terbiasa menggunakan komputer, bahkan untuk operasi dasar seperti mengetik atau mengelola file. Hal ini menyebabkan proses pelatihan dan adaptasi sistem memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan target awal. Meskipun demikian, melalui pendekatan edukatif dan penuh kesabaran, perlahan-lahan para aparatur mulai menunjukkan perkembangan yang positif.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan perangkat keras yang tersedia di kantor kampung. Beberapa perangkat seperti komputer dan printer dalam kondisi kurang optimal, bahkan tidak seluruhnya berfungsi dengan baik. Selain itu, belum adanya sistem pemeliharaan perangkat juga menjadi masalah tersendiri yang perlu ditangani ke depan. Kendala ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah atau mitra swasta, untuk memastikan ketersediaan sarana penunjang yang memadai bagi keberlanjutan sistem administrasi digital (Tjilen et al. 2023). Keterbatasan waktu dalam kegiatan pendampingan juga menjadi tantangan yang cukup besar. Waktu yang tersedia untuk mengawal proses perubahan pola kerja, penerapan sistem baru, serta mendampingi aparatur secara rutin sangat terbatas, terutama dengan luasnya cakupan pekerjaan dan kebutuhan bimbingan yang tinggi. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi perancangan program pengabdian berikutnya agar memiliki desain waktu dan strategi pendampingan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Meski menghadapi berbagai kendala, pengabdian ini juga memberikan dampak sosial yang positif, terutama dalam mendorong partisipasi warga. Salah satu momen penting adalah ketika dilakukan forum diseminasi hasil pengabdian, yang mengundang tokoh masyarakat, warga kampung, dan aparat kampung untuk bersama-sama mengevaluasi hasil sementara dan memberikan masukan terhadap sistem administrasi yang diterapkan. Forum ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan warga dengan aparatur secara terbuka dan konstruktif. Kegiatan diseminasi ini tidak hanya menjadi wadah pelaporan hasil, tetapi juga alat penguatan akuntabilitas sosial. Masyarakat yang selama ini cenderung pasif, mulai memahami bagaimana administrasi kampung dijalankan dan mengapa dokumentasi yang baik penting untuk menjamin

kelancaran program pembangunan (Tambaip and Tjilen 2023). Masyarakat juga didorong untuk ikut serta dalam mengawasi dan memberikan umpan balik terhadap proses pelayanan publik, sehingga terbentuk hubungan timbal balik antara pemerintah kampung danarganya.

Transparansi yang mulai tumbuh dari proses penguatan administrasi ini menjadi modal sosial penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan kampung yang lebih terbuka dan inklusif. Keterbukaan informasi dan akses terhadap dokumen publik mendorong rasa memiliki masyarakat terhadap sistem yang sedang dibangun (Syahrudin, Tambaip, et al. 2023). Masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Dalam jangka panjang, partisipasi ini berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan kualitas pemerintahan lokal. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik di kampung dapat dilakukan secara bertahap, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Kuncinya adalah pendekatan adaptif yang memperhatikan kondisi riil lapangan, pelibatan masyarakat dalam proses, dan pemberian ruang tumbuh bagi perubahan perilaku kerja secara alami. Inovasi lokal seperti ini, meskipun sederhana, memiliki potensi besar untuk direplikasi dan dikembangkan lebih luas dalam konteks penguatan kapasitas pemerintahan kampung di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal lainnya.

## **KESIMPULAN**

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Kelapa Lima, Merauke, berhasil memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kapasitas aparatur kampung dalam bidang administrasi publik. Melalui pendekatan berbasis kebutuhan lokal, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung, aparatur kampung menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Implementasi sistem informasi administrasi kampung berbasis digital sederhana menjadi terobosan inovatif yang relevan dengan kondisi infrastruktur lokal, sekaligus menjadi solusi praktis untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses diseminasi hasil menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas mulai tumbuh sebagai bagian dari budaya kerja kampung. Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan perangkat dan literasi digital, kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan administrasi publik di tingkat kampung dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, model pengabdian ini berpotensi untuk direplikasi di kampung-kampung lain, khususnya di wilayah perbatasan, guna mendorong pemerintahan kampung yang profesional, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan tulus kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh aparatur dan masyarakat Kampung Kelapa Lima, Merauke, atas sambutan hangat, partisipasi aktif, serta kerja samanya selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk keterbukaan informasi, keterlibatan dalam kegiatan pelatihan, maupun kemauan untuk bertransformasi dalam tata kelola administrasi publik, menjadi kunci utama keberhasilan

program ini. Semoga kerja sama ini menjadi fondasi bagi kolaborasi yang berkelanjutan di masa mendatang demi kemajuan kampung dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Habibah, Umami. 2024. "Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa SMK Al MUSYAWIRIN." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 3(4).
- Jemalu, Salvinus Serafim, Roro Merry Chornelia Wulandary, and Annisa Purwatiningsih. 2025. "Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Perekonomian (Studi Pada Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu): Evaluation of Community and Economic Empowerment Policies (Study on Ngaglik Village Batu Sub-District Batu City)." *JADMENT: Journal of Administration and Development* 2(1):186–93.
- Kamala, Jum'iyatul, Selvi Aulya Salsa, Nurilawati Nurilawati, Raja Muhammad Iqbal Fachriansyah, and Firman Firman. 2025. "Integrasi Pelatihan Dan Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kapasitas Organisasi." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 8(1):22–32.
- Kristanti, Suci, and Eny Haryati. 2023. "Inovasi Program Bank Sampah Dalam Rangka Mewujudkan Kampung Zero Waste Di Kecamatan Sukolilo Surabaya." *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* 479–88.
- Lalu, Satria Utama. 2021. "Model Implementasi Interaksi Pemberdayaan Pada Kebijakan Dana Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Model Kompromistis)." *Model Implementasi Interaksi Pemberdayaan Pada Kebijakan Dana Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Model Kompromistis)* 1–156.
- Najamudin, Fachrul, and Adam Hafidz Al Fajar. 2024. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Pendekatan Abcd Untuk Mencapai SDG 1: Tanpa Kemiskinan." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 7(2):142–58.
- Nasir, Muhammad. 2025. "Implementasi Good Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Desa." *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal* 4(3):468–78.
- Nufus, Elok Aulia Bilawatin, Yatim Riyanto, and Sri Setyowati. 2024. "Strategi Dan Pendekatan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan." *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 6(2):185–202.
- Rikardus, Everistus, Robertus Pecamuya, Yulianus Tuakra, and Martinus Wika. 2025. "Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Merauke." *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(3):340–52.
- Saragih, Jopinus, Melisa Nur Asima Sidabutar, Jubelando O. Tambunan, Salim Efendi, and Adrian K. Tarigan. 2023. "Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kabupaten Simalungun." *Jurnal PKM Hablum Minannas* 2(2):73–85.
- Syahrudin, Syahrudin, Nur Jalal, Marthen A. I. Nahumury, Beatus Tambaip, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023. "Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Untuk Mengangkat Potensi Kampung Menuju Desa Mandiri." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 8(3):576–86.
- Syahrudin, Syahrudin, Beatus Tambaip, Alexander Phuk Tjilen, Pulung Riyanto, Nur Jalal, Paul Adryani Moento, Muhammad Novan Prasetya, and Syahrudin Husein Enala. 2023. "Membangun Karakter Positif Dan Kepemimpinan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Merauke." *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(3):95–105.
- Tambaip, Beatus, and Alexander Phuk Tjilen. 2023. "Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak."

- 
- Musamus Journal of Public Administration* 5(02):410–20.
- Tjilen, Alexander Phuk, Beatus Tambaip, Ruloff Fabian Yohanis Waas, Paul Adryani Moento, and Erwin Nugraha Purnama. 2023. “Penguatan Masyarakat Melalui Pengorganisasian Dan Peningkatan Organisasi PKK Dalam Memanfaatkan Limbah Sawit.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3(2):257–62.
- Wijayati, Ida Wahyu. 2025. “Urgensi Memahami Ketiganya Bagi Guru Dan Mahasiswa Pendidikan.” *Asesmen Pembelajaran: Teori Dan Praktik* 34.
- Zianida, Zidana, Izza Nuril Wafa, and Teguh Wibowo. 2024. “Pengabdian Kepada Masyarakat: Strategi Membangun Kerukunan Dalam Bermasyarakat Melalui Pendekatan Dan Praktik Di Desa Purwokerto.” *Berbudi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1):1–8.